

PERKEMBANGAN SEKOLAH *ALGEMEENE MIDDELBARE SCHOOL* (AMS) DI YOGYAKARTA TAHUN 1919-1942

Oleh: Esa Susanti Putri, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Yogyakarta, esasusanti08@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan merupakan sarana pembelajaran, pengetahuan, keterampilan dan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pada awalnya pendidikan di Hindia Belanda bertujuan untuk kebutuhan pekerja yang terampil dan terdidik untuk memperbaiki perekonomian Hindia Belanda. Salah satu sekolah yang didirikan oleh Belanda di Yogyakarta adalah sekolah AMS. Sekolah AMS yang ada di Yogyakarta merupakan sekolah AMS pertama yang didirikan di Hindia-Belanda. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui perkembangan sekolah *Algemeene Middelbare School* (AMS) di Yogyakarta pada tahun 1919-1942. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tanggal 5 Juli 1919 pemerintah resmi membuka sekolah menengah yang bernama *Algemeene Middelbare School* (AMS). Dampak dari adanya sekolah AMS ini dapat terlihat pada beberapa bidang seperti sosial, politik dan budaya. Mobilitas sosial merupakan dampak yang terjadi dari adanya sekolah AMS. Dalam segi budaya juga mereka sangat terpengaruh dengan budaya Barat yang mereka lakukan sehari-hari. Kesadaran dalam politik dan berorganisasi juga merupakan salah satu dampak dari adanya sekolah AMS. Pada bidang ekonomi, mereka juga mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai pemerintah. Sekolah-sekolah ini dapat mengubah pola pikir masyarakat Bumiputera untuk berpikir lebih modern dan terbuka akan segala hal.

Kata Kunci: *AMS, Yogyakarta, 1919-1942*

THE DEVELOPMENT OF ALGEMEENE MIDDELBARE SCHOOL (AMS) OF YOGYAKARTA IN 1919 –1942

Abstract

*Education is a means of learning, knowledge, and skills which passed down from one generation to another. Initially, the education of Dutch East Indies was aimed to fill the needs for skilled and educated labors to improve the economy of Dutch East Indies. One of the schools established by the Dutch in Yogyakarta was AMS school. AMS school located in Yogyakarta was the first AMS school to be established in Dutch East Indies. The purpose of this study is to find out the development of *Algemeene Middelbare School* (AMS) in Yogyakarta in 1919-1942. The results of this study shown that on July 5th, 1919 the government officially opened a secondary school which was called *Algemeene Middelbare School* (AMS). The impacts of the existence of the AMS school can be seen in several fields such as social, political, and cultural. Social mobility is an impact occurring from the establishment of AMS school. Culturally, they were also very much affected by the Western culture done every day. Political awareness and partaking in organization were also one of the impacts from AMS school. In economy, they were also employed as government employees. These schools can change the mindset of Bumiputera to think more modernly and to be more open to anything.*

Keywords: AMS, Yogyakarta, 1919-1942

PENDAHULUAN

Politik Etis (*Etische Politiek*)¹ merupakan salah satu tonggak awal adanya pendidikan di Indonesia. Politik etis mempunyai tiga semboyan yaitu, Irigasi, Edukasi dan Emigrasi. Dengan adanya pabrik tebu, irigasi, perkebunan dan juga kantor dagang yang lain menyebabkan kebutuhan akan tenaga kerja juga bertambah. Dengan adanya pendidikan yang di selenggarakan oleh pemerintah Hindia Belanda, diharapkan dapat diperoleh tenaga kerja bumiputera yang cekatan dengan upah yang rendah.

Semua pendukung politik Etis menyetujui ditingkatkannya pendidikan bagi rakyat Indonesia, tetapi ada dua aliran pemikiran yang berbeda mengenai jenis pendidikan yaitu, bagaimana dan untuk siapa. Snouck Hurgronje dan J.H Abendanon mendukung pendekatan pendidikan yang bersifat elite. Jadi pendidikan hanya diberikan pada kaum elite saja. Mereka menginginkan pendidikan yang lebih bergaya Eropa dengan bahasa Belanda sebagai pengantarnya bagi kaum elite, yang nantinya dapat mengambil alih banyak pekerjaan yang ditangani para pegawai pemerintah Belanda dan akan menciptakan suatu elite baru yang tahu berterima kasih dan bekerja sama.

Menurut Idenburg dan van Heutsz pendidikan juga harus mendukung golongan-golongan bawah dengan memasukan bahasa daerah sebagai pengantar.² Melalui kebijakan politik etis, masyarakat bumiputera harus diperkenalkan kebudayaan dan pengetahuan Barat yang telah menjadikan Belanda bangsa yang besar. Oleh karena itu, dalam dua dasawarsa sejak 1900, pemerintah

Hindia-Belanda banyak mendirikan sekolah-sekolah berorientasi Barat.

Secara tegas, tujuan pendidikan selama periode kolonial Belanda memang tidak pernah dinyatakan, tetapi dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pendidikan antara lain adalah untuk memenuhi keperluan tenaga buruh kasar kaum modal Belanda, di samping ada sebagian yang dilatih dididik untuk menjadi tenaga administrasi, tenaga teknik, tenaga pertanian, dan lain-lain yang dianggap sebagai pekerja-pekerja kelas dua atau kelas tiga.

Menurut penelitian komisi pendidikan yang dibentuk oleh pemerintah Hindia-Belanda pada 1918-1928, menunjukkan bahwa 2% orang-orang Indonesia yang mendapat pendidikan Barat berdikari, lebih dari 83% menjadi tenaga bayaran, serta selebihnya menjadi pengangguran. Diantara yang 83% tersebut, sebanyak 45% bekerja sebagai pegawai negeri. Pada umumnya, gaji pegawai negeri dan para pekerja jauh lebih rendah dibandingkan dengan gaji orang-orang Barat dengan pekerjaan yang sama.³

Pendidikan di masa kolonial Belanda dipengaruhi oleh kepentingan sang penjajah. Dalam hal ini, Belanda sebagai satu-satunya penjajah di Indonesia yang relatif lama menajajah dan bisa membentuk hegemoni kekuasaannya. Oleh karena itu, konteks pendidikan yang dicanangkan oleh Belanda merupakan bentuk penguatan alat-alat birokrasinya agar diisi oleh kaum terdidik baik pribumi maupun warga non-pribumi.

Untuk daerah Yogyakarta pertumbuhan dan perkembangan pendidikan pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, agak berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Mengingat bahwa Yogyakarta merupakan pusat Keraton (Kasultanan dan Pakualaman) maka keadaan pertumbuhan dan perkembangan pendidikannya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya.⁴

Yogyakarta merupakan salah satu kota di Pulau Jawa yang pendidikannya maju pada

¹ Politik Etis adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumiputera. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda, bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi (*een eerschuld*) terhadap bangsa bumiputera di Hindia Belanda.

² M.C Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, (Jakarta : Serambi, 2005), hlm. 330

³ *Ibid.*, hlm. 77.

⁴ Proyek Penelitian dan Pencacatan Kebudayaan Daerah, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978), hlm. 20.

waktu itu. Banyak didirikan sekolah-sekolah pribumi oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada mulanya sekolah yang didirikan hanyalah untuk anak-anak Belanda, anak orang asing lainnya atau anak bumiputera yang berasal dari tokoh-tokoh terkemuka. Sesuai dengan landasan politik yang dijalankan maka sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah juga mencerminkan arah politiknya yakni sekedar untuk memenuhi kebutuhan tenaga yang terdidik.⁵

Salah satu sekolah yang didirikan pemerintah Hindia Belanda di Kota Yogyakarta adalah *Algemeene Middelbare School* (AMS). AMS pertama kali didirikan di Yogyakarta pada tahun 1919. Sebenarnya hanya ada satu sekolah lanjutan yang menurut sistem persekolahan Belanda digolongkan ke dalam sekolah dasar, yaitu sekolah dasar yang lebih luas (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* atau MULO). Kelanjutan MULO ini adalah sekolah menengah umum (*Algemeene Middelbare School* atau AMS). AMS terbagi menjadi tiga jurusan yaitu bagian A1 : sastra klasik Timur, bagian A2 : sastra klasik Barat, dan bagian B pengetahuan alam.⁶ Sementara di Yogyakarta di dirikan AMS bagian B yang mempelajari tentang ilmu alam.

Mengacu pada latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "*Perkembangan Sekolah Algemeene Middelbare School (AMS) di Yogyakarta Tahun 1919-1942*". Yogyakarta dipilih sebagai pertimbangan karena sekolah AMS yang pertama kali dibuka di Hindia-Belanda berada di Yogyakarta. Yogyakarta sendiri cukup diperhitungkan oleh pemerintah kolonial sebagai kota pendidikan karena fasilitas pendidikannya lengkap mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah.

Secara temporal penelitian ini megambil rentang tahun 1919-1942. Tahun 1919 sekolah AMS yang pertama mulai dibuka oleh pemerintah Hindia-Belanda. Sedangkan batas akhir penelitian yaitu pada tahun 1942, dimana kekuasaan diambil alih dari pemerintah kolonial Hindia-Belanda ke pemerintahan Jepang.

Sehingga bentuk-bentuk sekolah dan sistem pendidikannya juga ikut berubah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam studi sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis secara tertulis atau suatu prosedur dalam menyusun detail-detail yang telah disimpulkan dari dokumen-dokumen otentik menjadi suatu kisah yang saling berhubungan. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode sejarah kritis. Metode sejarah kritis terdiri dari empat tahap pokok yaitu Heuristik, Verifikasi, Interpretasi dan Historiografi. Heuristik merupakan proses mengumpulkan atau menemukan sumber yang sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulis. Tahap kedua yaitu verifikasi atau kritik sumber, yaitu upaya untuk mendapatkan otentisitas (keaslian sumber) dan kredibilitis (kebenaran sumber).⁷ Tahap ketiga yaitu interpretasi, yaitu penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah yang diperoleh dari sumber sejarah. Interpretasi digunakan untuk mencari hal-hal yang saling berhubungan antara fakta yang satu dengan lainnya sehingga menjadi sebuah rangkaian fakta yang logis dan bermakna. Tahap keempat adalah historiografi atau penulisan sejarah. Historiografi merupakan tahap akhir dalam penelitian sejarah yang dituangkan dalam bentuk tulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. AWAL MUNCULNYA PENDIDIKAN DI YOGYAKARTA

Jauh sebelum Belanda datang ke Indonesia, orang Jawa telah memiliki lembaga-lembaga pendidikan sendiri. Wayang yang sudah ada sejak dahulu, menceritakan tentang guru bijaksana yang mengumpulkan anak-anak muda sebagai cantrik di rumahnya bagaimana hidup sebagai warga masyarakat yang baik.⁸

⁵ Sri Sutjiningsih & Sutrisno Kutoyo, *Sejarah Pendidikan daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981), hlm. 9.

⁶ *Ibid.*, hlm. 63.

⁷ Suhartono W Pranoto, *Teori & Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 35.

⁸ Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1981), hlm. 275.

Belanda membawa ke Indonesia suatu jenis pendidikan baru yang dalam banyak hal berbeda dari lembaga-lembaga pendidikan pribumi. Perbedaan yang pokok adalah : (1) Pendidikan yang dibiayai oleh Belanda di sekolah-sekolah umum netral terhadap agama; (2) tidak terlalu memikirkan bagaimana caranya hidup secara harmonis dalam dunia, tetapi terutama menekankan tentang bagaimana memperoleh penghidupan; (3) diselenggarakan berdasarkan perbedaan kelompok etnis dalam masyarakat; (4) juga diselenggarakan untuk mempertahankan perbedaan kelas dalam masyarakat Indonesia, terutama di kalangan orang Jawa; (5) sebagian besar diarahkan pada pembentukan kelompok elite masyarakat yang bisa dipergunakan untuk mempertahankan supremasi politik dan ekonomi Belanda di negeri jajahannya, dan dengan demikian benar-benar mencerminkan kebijakan pemerintah Hindia Belanda.⁹

Pada mulanya pemerintah kolonial mengadakan pendidikan dalam taraf pendidikan rendah, tetapi kemudian ternyata memerlukan pula tenaga terdidik dalam taraf menengah akhirnya pendidikan tinggi. Semua tingkat pendidikan ini diadakan semata-mata untuk memenuhi keperluan pemerintah kolonial sendiri. Kecuali itu menurut apa yang dikatakan oleh van der Prijs, juga “untuk membentengi Belanda dari *Volkano Islam*”.

Periode awal abad ke-20 merupakan periode yang cukup penting dalam sejarah Indonesia. Fondasi Indonesia sebagai negara bangsa mulai dibangun pada periode ini. Kesadaran kebangsaan itu tidak serta-merta muncul, namun melalui proses. Pendidikan merupakan media penting dalam proses pembentukan kesadaran itu. Di sisi yang lain, kesadaran terhadap terbentuknya sebuah bangsa, tentunya harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan rakyat terjajah. Salah satu komponen terpenting kesejahteraan adalah kesehatan.

Secara perlahan kebijakan kolonial Belanda lebih “manusiawi”, ketika mereka memperkenalkan kebijakan etis. Di bidang pendidikan, mulai ada peluang rakyat pribumi untuk terlibat dalam proses pendidikan model barat, di samping itu mereka mulai bisa mengakses layanan kesehatan yang lebih berkualitas. Dua bidang itu, kesehatan dan pendidikan, awalnya dilaksanakan oleh

pemerintah dan organisasi keagamaan (baik misi maupun zending).

Sejak dilancarkannya politik etika, maka masalah pendidikan di Yogyakarta mengalami pertumbuhan pesat. Pada tahun 1901 pemerintah Hindia Belanda dalam daerah Karesidenan Yogyakarta mulai memperbanyak sekolah kelas dua untuk rakyat dengan tidak mengingat keturunan.

Sekolah yang mula-mula diperkenalkan ialah Sekolah Kelas Dua, yang akan mendidik calon-calon pegawai rendah dan Sekolah Kelas Satu, yang diperuntukkan bagi anak-anak dari golongan masyarakat atas. Di samping itu, ada pula sekolah rendah yang terutama disediakan bagi anak-anak Eropa. Sejak awal abad ke-20 diperkenalkan sistem sekolah desa atau *volksschool*, yang pendiriannya bergantung pada kemampuan masyarakat setempat dan subsidi serta bimbingan pemerintah. Setelah menyelesaikan sekolah yang dapat diselesaikan dalam waktu tiga tahun - yang diajarkan hanyalah sekedar kepandaian membaca, menulis, dan berhitung - murid-murid yang terpilih dapat melanjutkan pendidikannya ke sekolah sambungan atau *vervolgschool* untuk masa dua tahun. Secara berangsur sistem ini menggantikan kedudukan Sekolah Kelas Dua, sebagai lembaga pendidikan yang terpenting bagi anak negeri.

Untuk keperluan anak-anak dari kelas atas, didirikan pula HIS (*Hollandsch Inlandische School*). Dalam sekolah ini secara berangsur mulai dipakai bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Setelah menyelesaikan pelajaran selama tujuh tahun, murid yang pintar dan mempunyai orang tua yang cukup mampu dapat melanjutkan ke MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*), sekolah lanjutan pertama, dari sinilah kemudian dapat melanjutkan ke AMS (*Algemeene Middelbare School*). Jika nasibnya baik, bersyukurlah dapat melanjutkan pelajaran ke sekolah tinggi. Mula-mula harus ke Eropa, tetapi sejak awal tahun 1920-an beberapa kemungkinan telah terbuka pula di Hindia Belanda.¹⁰

Yogyakarta menjadi penting dikaji, karena Yogyakarta memiliki pengalaman yang menarik.

¹⁰ Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V : Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Republik Indonesia (1900-1942)*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2011), hlm. 109.

⁹ *Ibid.*, hlm. 278.

Kelompok pribumi dan Eropa memiliki peluang untuk terlibat dalam bidang pendidikan dan kesehatan, khususnya pada periode awal abad ke-20.

Sebelum tahun 1900 di dalam kota Yogyakarta terdapat Sekolah Asli yaitu Sekolah Tamanan dan Sekolah Madyapenganti. Selain itu juga ada dua sekolah *Gubermen* (Sri Menganti dan Pagelaran), dua sekolah partikelir (dalam daerah Kasultanan).¹¹

Para elite birokrasi tradisional Yogyakarta merasa perlu dan berkepentingan untuk memajukan pendidikan di kalangan penduduk pribumi. Pada 1890, di gedung Srimanganti Sultan mendirikan sebuah sekolah dan mewajibkan para pejabat keraton yang akan menggantikan ayahnya harus memiliki sertifikat sekolah tersebut. Sekolah itu jelas untuk anak para bangsawan, namun kemudian terbuka untuk para anak abdi dalem, dan kemudian disebut dengan *Eerste Klasse School met de Basa Kraton*. Pemerintah mengrimkan guru bantu ke sekolah itu setahun kemudian.¹²

Sejak 1891 terjadi peningkatan jumlah murid sekolah, sehingga Direktur Pengajaran dan Ibadat di Yogyakarta merasa perlu membangun sekolah baru, khususnya untuk para perempuan. Antara 1898-1905 pemerintah mendirikan *Tweede Klasse School* di Mergoyasan, Jetis, Ngabean, Pakualaman, dan Gading. Di awal abad ke-20, di Yogyakarta juga didirikan *Kweekschool*, untuk mendidik para calon guru.

Pada umumnya sekolah-sekolah tersebut mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Berdasarkan catatan tahun 1917 "*de Gereformeerde Schoolband van Nederlandsch-Indie te Djogjakarta*" sudah berhasil mengembangkan sekolah-sekolah Kristen, yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip pendidikan yang dikembangkan oleh gereja-gereja Protestan. Pengajaran untuk anak-anak Jawa dengan "*grondslag*" Kristen di

Yogyakarta dikembangkan oleh "*Vereeniging een Hollandsch-Javaansche School met den Bijbel te Djogjakarta*". Pengajaran lanjutan untuk pemuda-pemudi bumiputera dengan pengantar Bahasa Belanda di Yogyakarta juga dikembangkan oleh "*Vereeniging tot bevordering van neutraal lager onderwijs aan inlanders te Soerakarta en te Djogjakarta*". Pengajaran untuk kaum perempuan bumiptera tampak diupayakan oleh "*Vereeniging voor Javaansche Meisjescholen te Djogjakarta*", dengan bahasa pengantar bahasa Belanda.¹³

Di wilayah Yogyakarta, khususnya di bagian kota, terdapat dua kategori sekolah, yaitu : sekolah pertama (untuk anak-anak pejabat dan memiliki status ekonomi yang tinggi), dan sekolah kedua (sekolah untuk anak kaum priyayi rendahan).¹⁴ Awalnya, anak-anak orang Eropa akan bersekolah di sekolah khusus untuk golongan Eropa tingkat sekolah dasar, baru pada tingkat sekolah menengah mereka bisa bersama dengan anak-anak murid Jawa.¹⁵

Pada tahun 1920 menurut sensus yang diadakan oleh pemerintah, maka tercatat perbandingan antara jumlah penduduk, jumlah murid serta jumlah guru di Yogyakarta berdasarkan etnis. Dari 3.730 jiwa penduduk Eropa pada tahun 1920, terdapat 1.645 murid pada tahun 1924 dan 175 guru. Untuk golongan bumiputera pada tahun 1920 penduduk berjumlah 94.154 jiwa dan tahun 1924 terhitung jumlah murid yang bersekolah berjumlah 9.272 murid serta ada 240 rang guru. Untuk golongan Tionghoa penduduknya berjumlah 5.643 jiwa pada tahun 1924 tidak tercatat murid yang bersekolah sedangkan tercatat ada 7 orang guru yang mengajar di sekolah. Golongan arab berjumlah 21 jiwa pada tahun 1924, tidak

¹³ RA, 1917, hlm. 341-343

¹⁴ Tentang sejarah lembaga pengajaran atau sekolah bisa dipelajari dalam Dr. Jan S Aritonang, *Sejarah Pendidikan Kristen di Tanah Batak : Suatu Telaah Historis-Teologis atas Perjumpaan Orang Batak dengan Zending (khususnya RMG) di Bidang Pendidikan, 1861-1940*, (Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1988), hlm. 14-24.

¹⁵ Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1986), hlm. 38

¹¹ Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978), hlm. 20.

¹² Abdurachman Surjomiharjo, *Kota Yogyakarta 1880-1930 : Sejarah Perkembangan Sosial*, (Yogyakarta : Yayasan Untuk Indonesia, 2000), hlm. 56.

tercatat ada murid yang bersekolah dan ada 1 orang yang menjadi pengajar.¹⁶

Berdasarkan data statistik sekolah di ibukota Yogyakarta tertanggal 31 Desember 1924, gambaran mengenai perimbangan sekolah swasta dan pemerintah tampak jelas.¹⁷ Statistik sekolah di Kota Yogyakarta 1924 menunjukkan di kota ini terdapat 70 sekolah.¹⁸

Ketika Yogyakarta tengah berada dalam situasi kolonial, ternyata mampu memberi peluang kotanya untuk terlibat. Masyarakat Kota Yogyakarta memiliki peluang untuk terlibat dalam bidang pendidikan dan kesehatan, walaupun keduanya tidak bebas dari diskriminasi. Pada tingkat-tingkat tertentu masyarakat luas bisa mengeyam pendidikan, walaupun untuk kualitas pendidikan yang lebih baik memang diperuntukkan hanya bagi golongan-golongan tertentu di tengah masyarakat, khususnya kelompok bangsawan. Di bidang kesehatan, masyarakat sudah mulai dikenalkan dengan tradisi kedokteran barat.

Pihak-pihak yang bisa masuk dalam sistem dan fasilitas yang dibangun pemerintah kolonial, di kemudian hari menjadi pelopor pembaharuan di Kota Yogyakarta. Pada tingkat tertentu mereka-lah yang menjadi pelopor pembangunan kesadaran berbangsa. Kritik terhadap kebijakan kolonial dan pelopor dialog dengan kekuatan kolonial sering datang dari kelompok ini. Mungkin tahap inilah yang menjadi tahap awal pembangunan nasionalisme Indonesia, dalam konteks Yogyakarta pada periode awal abad ke-20. Rakyat mulai menuntut dan bisa mengakses fasilitas sosial perkotaan yang dibangun pemerintah kolonial, sembari terus menekan diskriminasi di semua aspek kehidupan pekotaan.¹⁹

Orang-orang yang berhasil menyelesaikan pendidikan sering kali menjadi pelopor perubahan. Dengan bekal pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah dan swasta Belanda, masyarakat Kota Yogyakarta mendapat peluang beradaptasi dengan perkembangan ilmu Barat atau paling tidak ilmu itu menjadi "*weg tot het western*" (jalan ke barat),²⁰ dan kemudian memberi peluang pula kepada mereka mengkritisi kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Abdurachman Surjomiharjo, menyebut kelompok terpelajar ini sebagai professional communicators. Dari merekalah ide-ide kebangsaan dikaji dan disebarluaskan, termasuk mengkritisi kebijakan kolonial, yang dikenal sangat diskriminatif.²¹

Di Yogyakarta pendidikan mulai dapat perhatian lebih ketika Mullemeister menjabat sebagai residen (1880-1891). Pada tahun 1879 di Yogyakarta hanya terdapat satu sekolah milik pemerintah dan satu sekolah Partikelir di daerah Paku Alam.²² Lalu ditahun 1890, Sultan mendirikan sekolah yang merupakan sebuah pendopo kesultanan yang diberi nama Srimanganti. Srimanganti sendiri diperuntukkan untuk anak-anak yang merupakan anak raja atau priyayi. Srimanganti dikenal dengan *Eerste Klasse School Met De Basa Kedaton* (sekolah yang diperuntukkan golongan nomor 1). Lalu pada tahun 1898 didirikan pula *Tweede Klasse School* (sekolah untuk golongan kelas dua) di Margoyasan, Jetis, Ngabean, Pakualaman, dan Gading.²³

Setelah tahun 1900, ketika Van Deventer menjabat sebagai gubernur Hindia Belanda menerapkan Politik Etisnya yaitu Edukasi, Irigasi, dan Emigrasi perkembangan

¹⁶ *Gegevens over Djogjakarta 1925: 125-132*. Untuk jumlah murid dan guru: 138-145 menurut sensus penduduk tahun 1920.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 125-132

¹⁸ Langgeng Sulistyو Budi, *Fasilitas Sosial Perkotaan Pada Awal Abad Ke-20 : Rumah Sakit dan Sekolah di Yogyakarta* dalam buku *Kota-Kota di Jawa : Identitas, Gaya Hidup dan Permasalahan Sosial*, (Yogyakarta : Ombak, 2010), hlm. 182-183.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 184.

²⁰ Kajian tentang peran Bahasa Belanda, khususnya dalam model pendidikan Barat, bisa dipelajari dalam karya Kees Groeneboer, *Jalan ke Barat : Bahasa Belanda di Hindia Belanda, 1600-1950 : Sejarah Politik Bahasa*, Ter. (Jakarta : Pusat Bahasa Erasmus, 1995).

²¹ Langgeng Sulistyو Budi, *op.cit.*, hlm. 185.

²² Abdurachman Surjomiharjo, *Kota Yogyakarta 1880-1930 : Sejarah Perkembangan Sosial*, (Yogyakarta : Yayasan Untuk Indonesia, 2000), hlm. 67.

²³ *Ibid.*, hlm. 68

pendidikan di Indonesia menjadi lebih progresif. Di Yogyakarta, fasilitas pendidikan seperti sekolah semakin bermunculan.

Fasilitas pendidikan di Yogyakarta cukup lengkap dari mulai pendidikan untuk sekolah dasar hingga pendidikan sekolah menengah. Sekolah dasar yang ada di Yogyakarta antara lain ELS dan HIS. Sekolah menengah ada MULO dan juga AMS. Untuk mendapatkan tenaga pengajar yang terampil pemerintah membuka *kweekschool*. Pemerintah juga menyediakan sekolah pertukangan, yaitu *ambachtschool*.

B. PERKEMBANGAN SEKOLAH AMS DI YOGYAKARTA

Sebuah laporan menunjukkan penjelasan dari tugas yang diberikan kepada komisi pendidikan untuk memberi nasehat dan penyuluhan tentang cara bagaimana memenuhi kebutuhan akan pendidikan menengah (persiapan pendidikan tinggi) di Hindia-Belanda. Sekolah yang menyesuaikan diri dengan kepentingan dan kebutuhan khas Hindia-Belanda. Bagi berbagai golongan penduduk, dan yang memberi kesempatan untuk memperoleh ijazah, yang memberikan hak-hak yang sama terhadap penerimaan pelajaran dan ujian pada universitas dan lembaga pendidikan tinggi lainnya di negeri Belanda, seperti yang diberikan sebagai ijazah yang sekarang diminta untuk pendidikan tinggi.²⁴

Tempat berdirinya sekolah persiapan pendidikan tinggi yang pertama dipilih adalah Yogyakarta, karena sesudah Batavia, Surabaya, Semarang dan Bandung, yang semuanya telah memiliki HBS 5 tahun, Yogyakarta merupakan kota yang paling penting di Hindia-Belanda. Pemilihan Yogyakarta tepat, karena disana ada hasrat yang sangat kuat untuk memperoleh pendidikan lebih lanjut, terbukti dengan adanya perkumpulan atau Komite yang mengadakan aksi untuk dapat memperoleh HBS dan MULO. Letaknya tepat bagi lembaga pendidikan sentral.

Didirikannya MULO sebagai lanjutan segala macam sekolah rendah yang berorientasi barat, khususnya HIS merupakan langkah yang sangat penting dalam perkembangan suatu sistem pendidikan yang lengkap di Indonesia. Langkah berikutnya adalah dibukanya AMS.

AMS dibuka berdasarkan Keputusan Pemerintah Hindia-Belanda tanggal 16 Januari 1919.²⁵

Beberapa kalangan Belanda, seperti Van Deventer, H. Colijn, dan H.D. Tjeenk Willink, memandang MULO belum cukup. Mereka menganggap perlu ada sekolah lanjutan bagi bumiputera yang langsung terkait dengan MULO, semacam HBS, tapi lama belajar tiga tahun.²⁶

Menanggapi usul-usul itu, pemerintah membentuk komisi penyelidikan kemungkinan sekolah lanjutan bagi bumiputera pada 1915. Komisi dipimpin Prof. dr. J. Woljter, pengganti Dirk Fock, yang mengusulkan dibentuk sekolah menengah bumiputera (*Indische Middelbare School*). Dengan lama belajar tiga tahun, sekolah ini dianggap sama dengan sekolah HBS, dan lebih terkenal dengan *Algemeene Middelbare School* (AMS).²⁷

Ada beberapa alasan pendirian sekolah menengah menjadi hal yang penting. Lulusan MULO yang dihalangi memperoleh pendidikan yang sama dengan HBS akan meminta agar diberi kesempatan untuk memasuki perguruan tinggi. Perlu di ingat bahwa pada saat orang Cina memaksa pemerintah membuka HCS bagi anak-anak mereka.²⁸

Untuk memberikan akses yang lebih baik kepada kaum pribumi, akhirnya dibuatlah sebuah jalur pendidikan menengah yang baru di Hindia Belanda. Pada tahun 1916 Pemerintah Kolonial Hindia Belanda menerima usul dari sebuah komisi tentang pendidikan *Algemeene Middelbare School* (AMS). Pada jalur pendidikan menengah ini ditempuh selama enam tahun dalam dua bagian. Bagian bawahnya disebut *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs MULO afdeling der AMS* – pendidikan menengah umum bagian pendidikan dasar yang diperluas, kemudian bagian kedua/atas disebut *Vorbereidend Hooger Onderwijs afdeling der Algemeene Middelbare School* (VHO AMS) yaitu pendidikan menengah

²⁵ *Staatblads*, 1919, no. 259.

²⁶ Parakitri T. Simbolon, *Menjadi Indonesia*, (Jakarta : Kompas, 1995), hlm. 213.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 214.

²⁸ S Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2014), hlm. 137.

²⁴S. L van der Wal, *Pendidikan di Indonesia 1900-1940*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977), hlm. 34.

umum bagian persiapan pendidikan tinggi. Tamatan *afdeeling* VHO ini dapat diterima berdasarkan peraturan di perguruan tinggi di Negeri Belanda.²⁹

Sekolah AMS setara dengan SMA (Sekolah Menengah Atas) pada saat ini yakni pada jenjang sekolah lanjutan tingkat atas. AMS menggunakan pengantar bahasa Belanda dan pada tahun 1930-an, sekolah-sekolah AMS hanya ada di beberapa ibu kota provinsi Hindia Belanda yaitu Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Selain itu AMS ada di Yogyakarta, Surakarta dan beberapa kota Karesidenan seperti di Malang. Orang tua murid menyekolahkan anaknya ke sekolah AMS, dengan harapan dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu misalnya ke THS (*Technische Hoogeschool te Bandoeng*) di Bandung RHS (*Rechtshoogeschool te Batavia*) di Jakarta, GHS (*Geneeskundige Hoogeschool te Batavia*) di Jakarta, *Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte* (fakultas sastra dan filsafat), atau ke Bogor di *Faculteit der Landbouwwetenschap*. Melalui AMS berarti harus menyelesaikan MULO lebih dahulu tersebar di hampir semua provinsi yang hanya berjumlah delapan, sedangkan kalau melalui HBS hanya ada di Surabaya, Semarang, Bandung, Jakarta, atau Medan.

AMS dianggap berhasil memberikan perbaikan dalam pendidikan menengah di Hindia Belanda, utamanya untuk kaum pribumi. Setelah AMS pertama dibuka di Yogyakarta pada tahun 1919, menyusul kemudian AMS A.II dibuka di Bandung pada tahun 1920, AMS A.I di Surakarta pada tahun 1926 dan AMS B di Malang pada tahun 1927. Patut menjadi catatan tersendiri, adalah jumlah murid pribumi yang lulus dari AMS B Yogyakarta. Dalam 10 tahun, AMS B telah meluluskan 168 murid yang berasal dari kaum pribumi. Jumlah ini adalah sekitar 57.5% dari jumlah seluruh lulusan AMS B. Jumlah tersebut lebih banyak dibanding jumlah seluruh lulusan pribumi keempat HBS di Hindia Belanda. Sepanjang eksistensi HBS yang sudah lebih dari 60 tahun ada di Hindia Belanda, tercatat hanya ada 147 lulusan HBS yang berasal

dari kaum pribumi. Bandingkan dengan 168 alumni pribumi AMS B dalam 10 tahun. Hal ini merupakan suatu cerminan kesuksesan AMS B dalam memperbaiki pendidikan menengah di Hindia Belanda, namun di sisi lain juga memperlihatkan betapa akses pendidikan bagi kaum pribumi masih sangat terbatas pada masa itu.³⁰

Jumlah yang harus dikeluarkan pemerintah untuk membangun sekolah AMS sebanyak f43950. Anggaran tersebut digunakan untuk biaya gaji kepala sekolah sebanyak f7200, gaji guru selama 6 bulan bekerja sebesar f11700, tunjangan pelajaran sebanyak f1800, tunjangan untuk komite pengawas f300, serta untuk keperluan alat sekolah sebesar f1350. Untuk pembangunan ruangan kelas sekolah yang berjumlah 11 ruang termasuk ruang kelas, ruang praktek dan ruang kepala sekolah serta guru biaya yang harus dikeluarkan adalah f12750. Pemerintah juga menyediakan anggaran beasiswa bagi murid yang berprestasi sebesar f6000. Jumlah ini berdasarkan anggaran yang disediakan oleh pemerintah pada anggaran belanja tahun 1918.³¹

Sistem pendidikan pada sekolah AMS dijelaskan sebagai berikut :

1) Kurikulum

Dalam sekolah AMS sendiri dibagi dalam dua bagian, bagian A mengutamakan sastra dan sejarah, sedangkan bagian B mengutamakan matematika dan fisika. Untuk mencegah perkembangan berat sebelah, maka bagian A juga diberikan pelajaran matematika dan fisika, sedangkan bagian B juga diberikan sastra dan sejarah. Namun, bagian A tetap fokus kepada pelajaran sastra dan sejarah. Bagian B juga tetap fokus pada pelajaran matematika dan fisika. AMS bagian A dibagi lagi menjadi dua yaitu, bagian AI yang mempelajari studi klasik timur, dan bagian AII yang mempelajari bagian studi klasik barat. Masing-masing bagian memiliki lama studi 3 tahun.

Kurikulum AMS terdiri atas mata pelajaran umum yang diharuskan bagi semua siswa yakni bahasa Belanda, bahasa Melayu, bahasa Inggris, sejarah, geografi, undang-undang negara,

²⁹ ANRI, *Algemeene Secretarie Grootte Bundel Ter Zijde Geledge Agenda 1891-1942* No. 7062

³⁰ 5 Juli, Hari Jadi *Algemeene Middelbare School Afdeeling B te Djokja*" dalam <http://padmanaba.or.id/>

³¹ ANRI, *Algemeene Secretarie Grootte Bundel Ter Zijde Geledge Agenda 1891-1942* No. 7062

matematika, botani, dan zoologi. Tiap bagian AMS mempunyai mata pelajaran khusus sesuai dengan hakikat bagian itu. Tiap bagian AMS mempunyai mata pelajaran khusus sesuai dengan hakikat bagian itu. AMS bagian AI klasik Timur, meliputi bahasa Jawa, arkeologi, etnologi Indonesia, fisika, kimia, menggambar tangan, dan bahasa Jerman, sedangkan bahasa Perancis, dijadikan elektif. AMS bagian AII, klasik barat, menyajikan mata pelajaran yang sama seperti bagian AI kecuali bahasa Latin sebagai pengganti bahasa Jawa dan arkeologi juga tata buku.³²

Murid baru yang berasal dari lulusan MULO dapat masuk ke AMS tanpa harus mengikuti tes masuk dengan beberapa syarat, untuk murid AMS bagian A harus mendapat nilai minimal 6 dalam mata pelajaran Bahasa Inggris dan juga bahasa Belanda pada saat belajar di MULO. Sedangkan, untuk murid AMS bagian B masing-masing harus mendapat minimal nilai 6 pada mata pelajaran aljabar, geometri dan bahasa Belanda pada saat bersekolah di MULO. Untuk mereka yang tidak mempunyai nilai rapor seperti yang telah disebutkan dan ingin memasuki AMS, maka akan diadakan tes masuk ke AMS.

2) Biaya Sekolah

Biaya sekolah yang harus dibayarkan untuk sekolah yang didirikan pemerintah Belanda berbeda-beda besarnya. Untuk tingkatan sekolah menengah ada sekolah MULO, HBS dan juga AMS. Besaran biaya pendidikan untuk tingkatan MULO sebesar f213, untuk HBS sebesar f174. Sementara itu besaran biaya sekolah yang harus dibayarkan untuk tingkatan sekolah AMS adalah sebesar f260 yang harus dibayarkan pertahun.³³

3) Guru

Guru adalah seorang yang memberi dan melaksanakan tugas pendidikan, tugas untuk mendidik. Tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, melatih, menilai dan mengevaluasi

peserta didik.³⁴ Guru-guru AMS harus memenuhi syarat yang sama dengan HBS dan sering seperti di Bandung, guru yang sama mengajar di HBS dan AMS.

Untuk mengajar di sekolah menengah seorang guru harus memiliki "*MO Akte*", yaitu akte yang memberikan wewenang kepada pemilikinya untuk mengajar di Pendidikan Menengah (*Middelbare Onderwijs*). Terdapat dua jenis Akta MO, yaitu MO A dan MO B. Akta MO A memberi wewenang penuh untuk mengajar dalam mata pelajaran tertentu di tingkat MULO dan HBS³⁵. Akta MO B memberi wewenang penuh untuk mengajarkan mata pelajaran tertentu pada tingkat AMS dan HBS.³⁶

Pendidikan untuk mendapatkan Akta MO pada umumnya hanya tersedia di negeri Belanda. Pendidikan yang menuju ke arah ini dan terdapat di Hindia-Belanda pada waktu itu adalah pendidikan untuk mendapatkan Akta MO Ilmu Pasti dan Akta MO A Bahasa Inggris. Pendidikan untuk Akta MO dalam Ilmu Pasti ini dititipkan pada *Technische Hoogeschool* di Bandung (sekarang ITB), dan diberi nama *Leergang tot Opleiding voor de Middelbare Akte Wiskunde*, dan Akta yang diberikan bernama Akta K1. Di Belanda terdapat pendidikan untuk mencapai Akta MO dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan Arkeologi, Ilmu Bumi dan Etnologi Hindia-Belanda, Bahasa Melayu,

³⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 288.

³⁵ HBS adalah singkatan dari Hoogere Burger School, yaitu sekolah menengah untuk rakyat umum. Sekolah ini di Negeri Belanda didirikan pada tahun 1863, untuk memberi kesempatan kepada rakyat biasa untuk menempuh pendidikan menengah. Ada 2 program pada HBS, yaitu program 3 tahun, dikenal dengan HBS 3, dan program HBS 5 tahun yang dikenal dengan HBS 5. di Hindia-Belanda sekolah HBS dipandang lebih bergengsi daripada sekolah MULO-AMS. Tetapi di negeri Belanda sendiri, HBS dipandang kurang bergengsi dibandingkan dengan sekolah Lyceum atau Gymnasium.

³⁶ Mochtar Buchori, *Evolusi Pendidikan di Indonesia : Dari Kweekschool Sampai ke IKIP : 1852-1998*, (Yogyakarta : Insistpress, 2007), hlm. 18.

³² S. Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2014), hlm. 138.

³³ S. L van der Wal, *Pendidikan di Indonesia 1900-1940*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977), hlm. 282.

Bahasa Jawa, dan Bahasa Sunda. Program-program pendidikan ini diselenggarakan di Universitas Leiden.³⁷

Pada waktu itu, para guru AMS berpendidikan tinggi dari THS ataupun GHS. Sehingga misalnya guru aljabar pada umumnya menyandang gelar Ir., guru sejarah menyandang gelar Mr., atau guru botani menyandang gelar dokter (*Arts*), dan sebagainya.

Jumlah pengajar atau guru di Yogyakarta berdasarkan semua etnis berjumlah 423. Jumlah tersebut dibagi dalam 4 etnis yaitu, Eropa, Bumiputera, Tionghoa dan Arab. Jumlah pengajar Eropa yaitu sebanyak 175 orang. Pengajar yang berasal dari Bumiputera berjumlah 240 orang. Pengajar yang berasal dari Tionghoa dan Arab masing-masing berjumlah 7 orang dan 1 orang.

Sementara itu, jumlah pengajar yang mengajar di sekolah AMS sendiri berjumlah 13 orang. Pengajar yang mengajar di sekolah AMS semua berasal dari golongan Eropa, tidak ada golongan pribumi ataupun golongan Asia lain yang mengajar di sekolah AMS.

4) Peserta Didik

Pada tahun 1925, tercatat ada 145 murid yang bersekolah di AMS Yogyakarta. Jumlah tersebut terbagi dalam 38 murid dari golongan Eropa dan 107 murid yang berasal dari golongan lainnya seperti bumiputera dan golongan Asia lainnya.³⁸

Patut menjadi catatan tersendiri, adalah jumlah murid pribumi yang lulus dari AMS B Yogyakarta. Dalam 10 tahun, AMS B telah meluluskan 168 murid yang berasal dari kaum pribumi. Jumlah ini adalah sekitar 57.5% dari jumlah seluruh lulusan AMS B. Jumlah tersebut lebih banyak dibanding jumlah seluruh lulusan pribumi keempat HBS di Hindia Belanda. Sepanjang eksistensi HBS yang sudah lebih dari 60 tahun ada di Hindia Belanda, tercatat hanya ada 147 lulusan HBS yang berasal dari kaum pribumi. Bandingkan dengan 168 alumni pribumi AMS B dalam 10 tahun. Hal ini merupakan suatu cerminan kesuksesan AMS B dalam memperbaiki pendidikan menengah di

Hindia Belanda, namun di sisi lain juga memperlihatkan betapa akses pendidikan bagi kaum pribumi masih sangat terbatas pada masa itu.

Beberapa tokoh yang menjadi alumni dari sekolah AMS yaitu, KGPAA Pakualam VIII dan Faridan M. Noto. KGPAA Pakualam VII menempuh pendidikan rendah di sekolah ELS, kemudian melanjutkan ke pendidikan menengah di *Christelijk MULO* Yogyakarta. Setelah lulus dari *Christelijk MULO* Yogyakarta kemudian beliau melanjutkan ke sekolah AMS Yogyakarta. Untuk pendidikan tinggi KGPAA Pakualam VIII melanjutkan ke *Rechtshoogeschool te Batavia* (Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta).

Faridan M. Noto menempuh pendidikan di *Neutrale MULO School* dan melanjutkan ke sekolah AMS B setelahnya. Faridan M. Noto merupakan pelajar yang cerdas, beliau selalu mendapatkan nilai-nilai yang cukup bagus untuk pelajaran dalam bidang eksak dan teknik. Faridan M. Noto memasuki AMS B pada tahun 1941. Hanya setahun beliau sekolah di AMS B sebelum sekolah tersebut ditutup oleh pemerintah Jepang. Banyak murid-murid AMS yang kembali ke kampung halamannya setelah sekolah tersebut resmi ditutup. Setelah AMS ditutup beliau kemudian memilih bergabung menjadi tentara PETA.

C. DAMPAK ADANYA SEKOLAH AMS

Pendidikan merupakan aspek terpenting dan termulia dari ciri-ciri idealis politik etis, sehingga pemerintah kolonial Hindia-Belanda mau tidak mau mempunyai tanggung jawab moral untuk memperhatikan perbaikan pendidikan anak-anak bumiputera.³⁹ Perkembangan pendidikan di Hindia-Belanda sejalan dengan perubahan sosial di negara Belanda. Sekolah membuka pintu bagi kelanjutan pendidikan, ternyata banyak juga menghasilkan seseorang dari masyarakat golongan bawah menjadi pejabat dengan keahlian yang dimiliki. Sekolah dalam hal ini

³⁷ *Reegering Almanak van Nederlandsch Indie*, 1935, hlm. 203

³⁸ *Gegevens Over te Djogjakarta*, 1925, hlm. 126.

³⁹ Suhartoyo, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia : Suatu Analisa Ilmiah*, (Yogyakarta : Liberty, 1976), hlm. 94.

telah menyebabkan pelebaran mobilitas sosial dengan pengaruh yang lebih terbatas.⁴⁰

Seiring dengan tuntutan kepentingan pemerintah kolonial Hindia-Belanda untuk melaksanakan politik Tanam Paksa, pintu pendidikan bagi masyarakat bumiputera secara perlahan telah dibuka. Sebenarnya kenyataan semacam ini lebih merupakan suatu bentuk tuntutan politik kolonial golongan liberal. Beberapa peristiwa penting baik langsung maupun tidak langsung yang ikut berpengaruh atas terjadinya perkembangan pendidikan di Hindia-Belanda.

Perubahan sosial yang sangat mencolok di Hindia Belanda antara lain, munculnya golongan-golongan terpelajar, masyarakat pribumi menjadi dapat membaca dan menulis sehingga mereka dapat bekerja pada perusahaan-perusahaan Belanda, yang akhirnya mereka dapat mengetahui perkembangan dunia luar.⁴¹

Pendidikan Barat yang diajarkan tidak hanya ilmu pengetahuan di berbagai bidang dari buku saja yang diserap, tetapi pendidikan formal yang menimbulkan sikap baru yang mencakup disiplin sosial, pemikiran rasional, gaya hidup menurut jadwal waktu dan nilai-nilai lainnya. Gaya hidup priyayi yang berpendidikan mendekati gaya hidup Eropa. Mereka beranggapan menggunakan budaya barat dapat menunjang jabatan. Hal ini tampak dalam cara bergaul dan dalam kehidupan sehari-hari. Keseharian bergaul dengan orang Eropa akan berpengaruh pada cara pandang. Misalnya, dalam hal cara lebih menghargai waktu dan disiplin kerja.⁴²

Tidak hanya masyarakat pribumi yang mengalami perubahan, masyarakat Eropa juga cenderung bercampur dengan pribumi. Saat bersekolah murid Eropa kebanyakan mengikuti cara berpakaian tradisional dengan memakai

kain dan kebaya, serta pada bagian rambut disanggul. Sementara laki-laki Eropa lebih suka memakai celana yang berbahan kain batik dan mengenakan baju putih saat di rumah. Mereka merasa tertarik dengan gaya pribumi, sehingga pakaian orang pribumi sering dipakai saat hari-hari biasa maupun saat bersekolah. Terjadinya akulturasi Eropa dengan Hindia Belanda dalam memperkaya khasanah budaya masing-masing.

Mendapat pendidikan Barat dan mahir berbahasa Belanda menguntungkan masyarakat untuk bekerja di kantor-kantor maupun perusahaan milik pemerintah. Jika dapat bekerja di kantor atau pemerintahan milik pemerintah mereka dapat dikatakan sebagai pejabat pemerintah yang dapat memegang posisi termuka dalam masyarakat. Timbulnya jabatan-jabatan baru untuk kepentingan kolonial yang semakin meluas. Jabatan baru ini antara lain, guru dan dokter (Jawa), mantri hewan, mantri kesehatan, juru tulis, pertanian, pekerjaan umum dan lain-lain.

Diluar kepomongprajaan lembaga pengajaran Barat menghasilkan tenaga-tenaga yang terlatih yang dapat dipekerjakan pemerintah. Sebagai contoh, dapat disebutkan bahwa pada tahun 1941 tercatat 90 sarjana hukum pribumi bekerja pada badan-badan pemerintahan, di antaranya 54 orang bekerja dibawah Departemen Kehakiman, 306 orang dokter bekerja pada Dinas Kesehatan. Pada tingkat lebih rendah dapat disebut bahwa pada tahun tersebut 58 orang dari jumlah 139 orang mantri hutan adalah orang Indonesia asli, sebanyak 139 orang pula bekerja sebagai mantri pertanian, dan sebanyak 63 orang bekerja sebagai mantri hewan. Semuanya adalah tenaga terlatih dan termasuk kelas atas dan menengah dalam struktur kepegawaian.⁴³

Sekolah dalam hal ini telah memulai semacam pelebaran mobilitas sosial yang lebih tinggi. Dasar kesahan dari lapisan atas mulai dipersoalkan jika dasarnya tidak didukung pula oleh pengajaran baru. Kecenderungan terbukanya jalan yang lebih lebar bagi mobilitas sosial terdapat pula dalam dunia kepegawaian.

⁴⁰ Riyadi Gunawan, *Sejarah Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), hlm. 85.

⁴¹ Djohan Makmur, dkk., *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan*, (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, tt), hlm. 78.

⁴² Djoko Soekiman, *Kebudayaan Indis Dari Zaman Kompeni Sampai Revolusi*, (Depok: Komunitas Bambu, 2014), hlm. 25.

⁴³ Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V : Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Republik Indonesia 1900-1942*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2011), hlm. 131.

Anak-anak pegawai rendah, karena pendidikan yang mereka peroleh, mempunyai kesempatan untuk melampaui tingkat yang pernah dicapai oleh orang tua mereka.⁴⁴

Dasar pemikiran untuk mengubah nasib dari terjajah menjadi berkuasa mandiri merupakan salah satu pemikiran yang muncul akibat kemampuan membaca. Ungkapan bahwa pendidikan adalah dinamika kolonialisme dirasa ada benarnya, karena dengan berkembangnya pendidikan maka masyarakat di dalamnya akan berwawasan luas dan menginginkan keadaan yang dinamis. Pertumbuhan dan perkembangan nasionalisme terwujud melalui kemunculan organisasi-organisasi kebangsaan, misalnya Budi Utomo dan Trikora Dharmo, bibit nasionalisme timbul secara bertahap. Perkembangan pendidikan dinilai berhasil jika dipandang dari sudut masyarakat bumiputera, tetapi perkembangan pendidikan merupakan suatu kegagalan politik pemerintah Hindia-Belanda. Ide awal pendidikan yang dimaksudkan untuk menciptakan tenaga rendah dengan upah kecil dari penduduk pribumi supaya bisa dikekang dan dipantau gerak-geriknya setiap saat ternyata diluar dugaan.⁴⁵

Usaha politis lain yang dilakukan adalah usaha rekrutmen tenaga dari pihak bumiputera. Dengan demikian, maka usaha koordinasi penghancuran kolonialisme Belanda akan berjalan secara intensif dan mudah. Tenaga-tenaga kerja, khususnya tenaga administrasi yang semula campuran, yaitu tenaga pribumi dan tenaga Belanda lambat laun bergeser menjadi tenaga pribumi seluruhnya. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa tenaga kerja administrasi haruslah pandai bersikap kooperatif dengan pihak Belanda, walaupun di belakang telah menyiapkan rencana mengeyahkan penjjajaan dari bumiputera.

Secara tidak langsung, pengaruh politik etis, terutama di bidang pendidikan, memberikan dampak positif bagi munculnya kaum pendidik dan pergerakan di Indonesia. Kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kemajuan bagi rakyat Indonesia dapat ditengarai dengan kemunculan tokoh-tokoh pergerakan dan tokoh yang memperhatikan pendidikan bagi rakyat.

Sekolah AMS ini juga menghasilkan tokoh-tokoh yang di zaman revolusi memegang

peranan dan menjalankan tugasnya secara wajar guna memenuhi tuntutan zaman. Mereka ikut melahirkan Negara RI dan lembaga-lembaganya. Diantaranya tokoh-tokoh tersebut ada yang menjadi anggota dan pendiri KNIP dan Badan Pekerja KNIP, ada yang menjadi menteri dalam kabinet, ada yang menjadi perwira dalam TKR dan menjadi TNI.

Selain nama-nama Letjen Suprpto, Letjen S. Parman, Suroto Kunto dan Djarot Soebijantoro, kusuma bangsa yang paling awal dipersembahkan AMS adalah Faridan M. Noto, yang gugur diterjang peluru saat dirinya bersama rekan-rekannya menyerbu markas tentara Jepang di Kotabaru, Yogyakarta.

KESIMPULAN

Di Yogyakarta sendiri ada beberapa sekolah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial di Yogyakarta diantaranya adalah sekolah kelas I, sekolah kelas II, *Volkschool*, ELS, HIS, HCS, MULO, AMS, *Ambachtschool*. Sementara itu, ada juga sekolah-sekolah swasta yang didirikan oleh tokoh pendidikan di Yogyakarta, yaitu ada Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hadjar Dewantara dan dari lembaga Islam Muhammadiyah juga banyak mendirikan sekolah-sekolah keislaman.

Sekolah AMS di Yogyakarta berdiri pada tahun 1919 yang bertempat di daerah Kotabaru (Sekarang menjadi SMA 3 Yogyakarta). Sekolah AMS merupakan substruktur dari MULO. Siswa yang berasal dari MULO biasanya melanjutkan sekolah di AMS. Beberapa orang dari kalangan Belanda merasa bahwa MULO saja masih belum cukup. Mereka mengaggap perlu ada sekolah lanjutan untuk bumiputera yang langsung terkait dengan MULO setara dengan SMA (Sekolah Menengah Atas) pada saat ini yakni pada jenjang sekolah lanjutan tingkat atas. AMS menggunakan pengantar bahasa Belanda dan pada tahun 1930-an, sekolah-sekolah AMS hanya ada di beberapa ibu kota provinsi Hindia Belanda yaitu Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Selain itu AMS ada di Yogyakarta, Surakarta dan beberapa kota Karesidenan seperti di Malang.

Dalam sekolah AMS sendiri dibagi dalam dua bagian, bagian A mengutamakan sastra dan sejarah, sedangkan bagian B mengutamakan matematika dan fisika. Untuk mencegah

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 131.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm.

perkembangan berat sebelah, maka bagian A juga diberikan pelajaran matematika dan fisika, sedangkan bagian B juga diberikan sastra dan sejarah. Namun, bagian A tetap fokus kepada pelajaran sastra dan sejarah. Bagian B juga tetap fokus pada pelajaran matematika dan fisika. AMS bagian A dibagi lagi menjadi dua yaitu, bagian AI yang mempelajari studi klasik timur, dan bagian AII yang mempelajari bagian studi klasik barat. Masing-masing bagian memiliki lama studi 3 tahun.

Dampak yang timbul akibat adanya pendidikan menjadikan pemikiran dan pandangan menjadi jauh lebih terbuka pada kaum terpelajar. Kaum terpelajar tersebut yang dinamakan kaum priyayi. Belanda membawa pendidikan baru yang dalam banyak hal berbeda dari lembaga-lembaga pendidikan pribumi. Pendidikan menimbulkan mobilitas sosial. Adanya pendidikan menciptakan tingkat intelektual yang semakin tinggi. Timbulnya organisasi modern memberikan kesempatan berkomunikasi dengan pelajar elite lainnya untuk memajukan modernisasi. Pendidikan modern yang diselenggarakan pemerintah Belanda melahirkan tokoh-tokoh intelektual.

Dengan adanya pendidikan barat, para murid mempunyai keahlian dalam bidang administrasi. Keahlian yang mereka miliki ini kemudian digunakan dalam mencari pekerjaan. Para lulusan sekolah barat kemudian dapat bekerja pada pemerintah sebagai tenaga administrasi rendahan. Mereka yang dapat melanjutkan ke perguruan tinggi juga dapat menjadi seorang dokter, ahli hukum dan lain-lain. Dengan adanya sekolah yang didirikan pemerintah ini juga mengubah keadaan ekonomi mereka, yang tadinya hanya berasal dari golongan ekonomi rendah tetapi dengan memiliki keterampilan mereka akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

Pengaruh budaya juga dirasakan setelah adanya sekolah ini. Karena setiap harinya mereka diajarkan bahasa Belanda di sekolah, maka dalam kehidupan sehari-hari juga mereka terbiasa berkomunikasi dengan bahasa Belanda. Gaya berpakaian yang mereka gunakan juga sangat kebarat-barata. Menggunakan setelan baju dan jas menjadi kebiasaan bagi mereka.

Usaha pengembangan pendidikan berjalan secara bertahap, kemajuan pendidikan di Hindia-Belanda menimbulkan golongan terpelajar dan elite modern dengan perannya yang kontra produktif terhadap sistem kolonial walaupun sistem tersebut tidak dapat dilaukan.

Adanya pendidikan di Hindia-Belanda yang melahirkan golongan terpelajar membuka jalan untuk menuju masyarakat yang lebih modern. Karena mendapat pendidikan, maka golongan terpelajar menjadi lebih terbuka dengan pemikiran untuk maju. Mereka kemudian bersama-sama mendirikan organisasi-organisasi politik yang bewawasan kebangsaan. Dari organisasi politik yang mereka dirikan, nantinya akan membantu Indonesia menuju kemerdekaan.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

ANRI, *Algemeene Secretarie Grootte Bundel Ter Zijde Geledge Agenda* 1891-1942 No. 9887

ANRI, *Algemeene Secretarie Grootte Bundel Ter Zijde Geledge Agenda* 1891-1942 No. 7062

Kolonial Verslag, "Onderwijs", tahun 1920

Staatblads, tahun 1919

Buku

Abu Ahmadi, *Sejarah Pendidikan*, Semarang : CV. Toha Putra, 1975.

Abdurrachman Surjomiharjo, *Kota Yogyakarta 1880-1930 : Sejarah Perkembangan Sosial*, Yogyakarta : Yayasan Untuk Indonesia, 2000.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 288.

Djoko Soekiman, *Kebudayaan Indis Dari Zaman Kompeni Sampai Revolusi*, Depok: Komunitas Bambu, 2014.

Djohan Makmur, dkk., *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan*, Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, tt.

Gegevens Over te Djogjakarta, 1925

- Langgeng Sulistyio Budi, *Kota-Kota di Jawa : Identitas, Gaya Hidup dan Permasalahan Sosial*, Yogyakarta : Ombak, 2010.
- Leo Agung. S dan Suparman. T, *Sejarah Pendidikan*, Yogyakarta : Ombak, 2016.
- Lloyd Warner. W & Abegglen. J.C, *Occupational Mobility in American Bussiness and Industry 1928-1932*, University of Minnesota Press, 1935.
- Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V : Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Republik Indonesia 1900-1942*, Jakarta : Balai Pustaka, 2011.
- Muhammad Rifa'i, *Sejarah Pendidikan Nasional : Dari Masa Klasik Hingga Modern*, Yogyakarta ; Ar-Ruzz Media, 2016.
- Mochtar Buchori, *Evolusi Pendidikan di Indonesia : Dari Kweekschool Sampai ke IKIP : 1852-1998*, Yogyakarta : Insistpress, 2007
- Moehadi, AM, dkk, *Sejarah Pendidikan Jawa Tengah*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997.
- Nasution, S, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Jakarta : Bumi Aksara, 2014.
- Parakitri T. Simbolon, *Menjadi Indonesia*, Jakarta : Kompas, 1995.
- Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978.
- Reegering *Almanak van Nederlandsch Indie*, 1935.
- Riyadi Gunawan, *Sejarah Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993.
- Sartono Kartodirjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru : Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme Jilid 2*, Yogyakarta : Ombak, 2015
- Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1981.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi : Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Press, 1986.
- Sri Sutjiningsih & Sutrisno Kutoyo, *Sejarah Pendidikan daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981.
- Suhartoyo, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia : Suatu Analisa Ilmiah*, Yogyakarta : Liberty, 1976.
- Suwarno. P. J, *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta : 1942-1974 : Sebuah Tinjauan Historis*, Yogyakarta : Kanisius, 1994.
- Van der Wal. S. L, *Pendidikan di Indonesia 1900-1940*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977.
- Skripsi**
- Zuyyun Wahyuningtyas, "Hollandsch-Chineesche School (HCS) dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Etnis Cina di Yogyakarta Tahun 1912-1942", *Skripsi*, Yogyakarta : Uiversitas Negeri Yogyakarta, 2009.
- Diah Sari Nastiti, "Perkembangan Sekolah MULO di Kota Magelang Tahun 1917-1942", *Skripsi*, Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.
- Moh. Fahmi Sofyan Omar, "Perkembangan Sekolah Netral di Yogyakarta 1916-1942", *Skripsi*, Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta, 2011.

Yogyakarta, 22 Oktober 2018

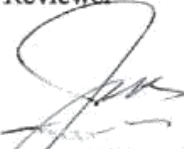
Pembimbing



Ririn Darini, M.Hum

NIP. 19741118 199903 2 001

Reviewer



Dinar Widiyanta, M.Hum

NIP. 19681010 199403 1 001

